BAB IV
PENUTUP

Komunikasi menjadi kurang efektif karena kepentingan masing-masing pihak Khususnya dalam pembahasan mengenai peyusunan APBD syarat akan kepentingan politik. Akibat dari komunikasi yang tidak efektif masih terjadi masalah-masalah seperti keterlambatan proses peyusunan kebijakan rangcangan APBD

Sumber daya dalam penyusunan APBD Kabupaten Belitung Timur diarahkan kepada pembentukan birokrasi bermartabat. Birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, dan taat. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau ataran-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan perkerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan Disposisi biasanya merupakan tindakan yang diambil pimpinan sehubungan adanya suarat masuk dari luar instansi maupun dari dalam instansi itu sendiri. Meskipun bagian administrasi memahami akan isi dan maksud surat itu namun yang berhak menindak lanjuti atas surat tersebut adalah pimpinan sehingga pimpinan perusahaan atau instansi akan mengluarkan disposisi dalam lembar lain atau lembar surat itu juga.

Struktur birokrasi merupakan salah satu penentu pelaksanaan kebijakan penyusunan APBD, dimana seluruh aparatur yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksana kebijakan. Struktur DPRD Belitung Timur terdiri dari pimpinan, badan musyawarah, badan legislasi, komisi, badan anggaran, badan kehormatan. Alat kelengkapan DPRD tersebut memiliki peranan bagi keberhasilan penyusunan RAPBD Kabupaten Belitung Timur yang dibahas dalam rapat paripurna.

Sebaiknya dalam menyusun RAPBD menjadi APBD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan RKP dan KUA-PPAS. Dalam penyusunan APBD harus sesuai dengan prioritas dan potensi yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Pemerintah berserta DPRD seharusnya meyusun APBD untuk kepentingan rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan , ekonomi kerakyatan untuk itu anggaran yang seharusnya menjadi prioritas adalah anggaran untuk kepentingan masyarakat bukan belanja pegawai.

Faktanya anggaran untuk belanja pegawai diKabupaten Belitung Timur masih lebih besar persentasenya daripada anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur daerah. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian DPRD dalam menyusun APBD pada rapat paripurna supaya menjunjung tinggi asas efektiftitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah agar prioritas daerah yang lebih diutamakan